



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**SAMBUTAN**  
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**PADA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)**  
**REGIONAL KALIMANTAN**

**Jakarta, 11 Maret 2016**

*Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,  
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,  
Yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
Yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
Yang terhormat Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan,  
Yang terhormat Para Gubernur Se-Kalimantan,  
Yang terhormat Para Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait,  
Yang terhormat Para Ketua DPRD Seluruh Provinsi Se-Kalimantan,  
Yang terhormat Para Anggota Muspida Seluruh Provinsi Se-Kalimantan,  
Yang terhormat Para Bupati dan Walikota Seluruh Provinsi Se-Kalimantan,  
Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Seluruh Provinsi Se-Kalimantan,  
Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Wakil Organisasi Masyarakat,  
dan Lembaga Swadaya Masyarakat Seluruh Provinsi Se-Kalimantan, serta  
Hadirin peserta Musrenbang Regional Kalimantan yang kami muliakan.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.*

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Kalimantan seiring dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 . Pertemuan seperti ini sangat penting untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergi kebijakan pembangunan antar provinsi se-Kalimantan serta dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu

pertama mengenai kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan Money Follow Program. Kedua terkait dengan pendekatan pembangunan dalam penyusunan RKP 2017. Ketiga mengenai Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017. Dan yang keempat terkait dengan tema strategis dan indikasi rencana pembangunan wilayah Kalimantan.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dalam beberapa bulan ini akan kita laksanakan merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun, pelaksanaan Forum Musrenbangnas yang berlangsung kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” saja.

Forum Musrenbangnas yang berlangsung kedepan diharapkan akan menghasilkan banyak kesepakatan yang tercapai. Namun mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan atau kebutuhan sangat banyak, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas belanja.

Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Rencana Kerja Pemerintah yang sedang disusun saat ini baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat **prioritas pembangunan**, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dipertegas kembali bahwa RKPD yang disusun dengan **berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**. Hal ini menunjukkan bahwa Program Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Namun demikian, penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan

manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Sebagaimana arahan Bapak presiden, bahwa anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function* lagi, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Sehingga perlu memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Untuk itu, usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

Saat ini Bappenas bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.

Holistik-Tematik digambarkan bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah. Integratif menunjukkan bahwa pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan *existing*, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan. Sedangkan spasial berarti pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain. Melalui pendekatan tersebut, saat ini Bappenas dan Kementerian Lembaga melakukan proses penetapan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang diturunkan dari Prioritas Nasional dalam telah tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Nawa Cita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Visi pemerintahan 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuh Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Nawacita sebagai sasaran dan tujuan pembangunan 2015-2019 telah menetapkan berbagai Prioritas Nasional yang terbagi dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu **“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”**. Tema pembangunan 2017 menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 telah dijabarkan beberapa sasaran makro pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional tersebut, maka disusun Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Revolusi Mental; (2) Pembangunan Pendidikan; (3) Pembangunan Kesehatan; dan (4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang merupakan bagian dari Dimensi Pembangunan Manusia. Sementara dari dimensi sektor unggulan antara lain (1) Kedaulatan Pangan; (2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (3) Kemaritiman dan Kelautan; (4) Pariwisata; (5) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan; (2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; (3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Pengembangan Konektivitas Nasional serta (5) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Seluruh Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program dan dan Kegiatan Prioritas serta dari Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Sekarang mari kita lihat sejenak sasaran dan tema pembangunan wilayah Kalimantan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan tumbuh cukup tinggi mengingat distribusi ekonomi wilayah Kalimantan yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan yang tinggi diharapkan peran wilayah Kalimantan dalam perekonomian nasional dapat meningkat. Adapun tema pembangunan wilayah Kalimantan yaitu Pertama, mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan. Kedua, lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi. Ketiga, pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. Serta keempat menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan selain mengacu pada tema pembangunan juga perlu mengacu pada tujuan penataan ruang wilayah Kalimantan.

Sesuai dengan fokus dalam pelaksanaan Musrenbang Regional Kalimantan, maka isu yang paling penting dalam pembangunan regional Kalimantan adalah isu terkait dengan pengembangan sektor unggulan yang meliputi **Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Kemaritiman dan Kelautan** termasuk pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, **Pengembangan Pariwisata** serta **Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus**. Isu lainnya yang penting adalah terkait dengan isu pemerataan antarwilayah yang meliputi **Pembangunan Wilayah Perbatasan** dan **Konektivitas**.

Dalam bidang **Kedaulatan Pangan**, sasaran pembangunan kedaulatan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat perlu didukung peran dari berbagai Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah. Untuk mendukung target produksi pangan padi dan

daging sebagai contoh perlu dijabarkan dalam pencapaian berbagai sasaran di seluruh provinsi. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran nasional merupakan agregasi dari sasaran pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa rencana indikatif pemerintah pusat melalui berbagai Kementerian/Lembaga yang meliputi sasaran terkait desa benih mandiri, desa organik tanaman pangan dan hortikultura serta rencana pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan bendungan/waduk serta irigasi. Dalam bidang **Kedaulatan Energi**, peningkatan rasio elektrifikasi menjadi salah satu sasaran utama pembangunan kedaulatan energi. Terkait dengan hal tersebut, maka disusun rencana pengembangan sumber daya air, ketenagalistrikan, transmisi & gardu induk di Kalimantan serta pembangunan Kilang Minyak Bontang. Untuk mendukung ketahanan energi telah direncanakan pembangunan berbagai pembangkit listrik di seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan.

Terkait dengan bidang **Kemaritiman dan Kelautan**, terdapat beberapa masalah dan tantangan pembangunan di bidang kemaritiman dan kelautan meliputi Pertama belum selesainya perbatasan laut dengan 9 negara tetangga, Kedua, belum selesainya pendataan pulau dan belum memadainya pembangunan pulau pulau kecil terluar, adanya kerusakan wilayah pesisir, *Illegal fishing*, *Over fishing*, pengembangan industri pengolahan perikanan, peningkatan kapasitas industri galangan kapal di Indonesia serta pengembangan pelabuhan strategis dan jaringan pelayaran. Berbagai rencana pembangunan untuk mendukung bidang kemaritiman dan kelautan meliputi pengembangan **Pelabuhan Palaran, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Balikpapan dan Kariangau** serta **Pelabuhan Pentoloan**. Selain pengembangan pelabuhan tersebut diatas dilakukan pula pengembangan Angkutan Sungai Kalimantan.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Sementara itu, dalam bidang pembangunan **Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus** ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang terus dikembangkan melalui berbagai dukungan di bidang infrastruktur. Pada tahun 2015-2019 direncanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kalimantan Utara serta di Kalimantan Barat. Sementara itu, untuk pengembangan Kawasan Industri, telah ditetapkan sebagai prioritas nasional pada periode 2015-2019 yaitu Kawasan Industri Ketapang di Kalimantan Barat yang memiliki potensi alumina, Kawasan Industri Landak di Kalimantan Barat yang memiliki potensi karet alam dan minyak sawit, Kawasan Industri Batulicin di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi besi dan baja serta Kawasan Industri Jorong di Tanah Laut Kalimantan Selatan yang memiliki potensi alumina dan minyak sawit.

Di bidang pembangunan **Pariwisata**, wilayah Kalimantan memiliki potensi wisata alam dan bahari yaitu Derawan dan Tanjung Puting serta memiliki potensi sebagai lokasi *Meeting, Incentives, Conference, Exhibition* (MICE) di Kota Balikpapan. Sedangkan dalam bidang **Pembangunan Kawasan Perbatasan** terdapat beberapa permasalahan yaitu kondisi ekonomi yang sangat timpang antara wilayah Indonesia dengan Malaysia, terutama di Pulau Sebatik, kerap terjadi pemindahan dan pengrusakan patok batas secara sengaja, ketidaksepemahaman batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia, kondisi jalan ke desa – desa masih sangat terbatas dengan perkerasan tanah hingga aspal, fasilitas PLBN belum terlalu lengkap dan bangunan yang ada kurang terpadu (kecuali Entikong yang sudah relatif lengkap), pembangunan infrastruktur yang terhalang oleh adanya hutan lindung serta garis batas yang belum diakui antara ke dua pihak dimana masih terdapat beberapa *outstanding border problems*. Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 2017 sasaran pembangunan akan difokuskan pada pengembangan 10 Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKLSN), 150 Lokasi Prioritas Kecamatan serta 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam kaitannya dengan pembangunan PLBN, di tahun 2017 akan difokuskan pada pembangunan zona inti PLBN terkait perumahan pegawai dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan terkait dengan Lokasi Prioritas, maka pada tahun 2017 akan difokuskan pada seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang meliputi 9 Kabupaten dan 28 lokasi prioritas Kecamatan.

Terakhir dalam bidang pembangunan **konektivitas**, beberapa rencana prioritas di wilayah Kalimantan meliputi pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan meliputi pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan - Samarinda, Jalur Tanjung-Balikpapan, Jalur Banjarmasin - Tanjung serta jalur Banjarmasin - Palangkaraya. Beberapa program prioritas lainnya di wilayah Kalimantan meliputi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda serta Pembangunan Bandara Samarinda Baru.

***Para Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,***

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas (atau Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (atau lintas SKPD) dan lintas wilayah dapat bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L (antar SKPD) dan pemerintah daerah (atau pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follow program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional. Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Pengembangan wilayah Kalimantan dalam Rencana Kerja Pemerintah ke depan diarahkan pada percepatan pusat-pusat pertumbuhan dengan komoditas prospektif melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim. Terkait dengan keterkaitan antara pusat pertumbuhan tersebut dengan daerah sekitar perlu didorong melalui konektivitas dan energi serta peningkatan kemampuan SDM terampil. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan juga perlu didorong melalui deregulasi terhadap aturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Sedangkan terkait dengan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan didorong dengan pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses transportasi lokal, pemenuhan infrastruktur dasar. Terakhir terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui *security approach* dan *prosperity approach*.

Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2015 - 2019 adalah tujuan

bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hal ini dikarenakan pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah (seluruh provinsi).

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 11 Maret 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**ttd**

**Sofyan A. Djalil**